BADAN PUSAT STATISTIK

SENSUS EKONOMI 2026

MENDORONG AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DARI DAERAH

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Regional

Jakarta, 10 Juli 2025

Moh Edy Mahmud
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

PEREKONOMIAN REGIONAL

Pembangunan ekonomi adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat → ***Pembangunan yang baik perlu diukur dan diarahkan secara berkala***

Salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah adalah PDRB. Melalui PDRB, bisa dilihat:

1. Apakah **ekonomi tumbuh atau melambat?**
2. **Sektor** apa yang menjadi **penggerak utama** ekonomi?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan oleh semua **lapisan masyarakat?**

Pendekatan Penghitungan PDB/PDRB

Pendekatan Produksi:
Jumlah seluruh **nilai tambah** barang dan jasa yang **dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi** di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Pendekatan Pengeluaran:
Penggunaan akhir berbagai barang dan jasa yang tersedia di perekonomian suatu wilayah

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga pertumbuhannya mencerminkan **peningkatan produksi barang dan jasa** di suatu wilayah pada suatu waktu dibandingkan waktu sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :
Y_t : PDRB ADHK tahun ke–t
Y_{t-1} : PDRB ADHK tahun sebelumnya

PDRB *meningkat* → **Berpotensi pada meningkatnya pendapatan masyarakat melalui peningkatan upah & gaji serta surplus usaha (investasi)**

PDRB *menurun* → **Perlu segera diatasi dengan kebijakan yang tepat**

PERAN PEMDA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

SENSUS EKONOMI 2026

Dari Sisi Produksi

Meningkatkan Output Produksi dan Nilai tambah

- Memberikan **dukungan bagi pelaku usaha** berupa pelatihan, pembiayaan, pemasaran, dan kemudahan izin usaha.
- Mendorong **hilirisasi** potensi daerah.
- Melakukan **diversifikasi produk** unggulan.

Menekan Biaya Produksi

- Mendorong **efisiensi logistik dan distribusi** melalui pembangunan infrastruktur transportasi.
- Menciptakan **iklim usaha** yang kondusif.
- Mekanisasi dan digitalisasi.

Dari Sisi Pengeluaran

Menjaga **daya beli masyarakat**, melalui stabilitas harga, penyediaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Mendorong **investasi**, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing.

Akselerasi **belanja pemerintah** untuk program pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kegiatan produktif.

Pemanfaatan Momentum Ekonomi

Musim panen

Meningkatkan **pemasaran hasil panen** dan menjaga **stabilitas harga.**

Perayaan hari besar/libur

Mendorong **sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat** melalui *event* budaya/festival lokal.

Event skala daerah/nasional

Mempromosikan **produk unggulan** daerah serta menarik **investasi dan wisatawan.**

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI DAERAH

Optimalisasi Potensi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

SENSUS EKONOMI 2026

KOLABORASI

Memantau perekonomian daerah setiap bulan

TUJUAN:

- **Memberikan informasi ekonomi yang cepat dan responsif**
- **Sinkronisasi pusat dan daerah**
- **Memperkuat peran data dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran**

9 Langkah Konkret:

1. **Mempercepat realisasi APBD**
   Dana yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar menggerakan perekonomian daerah
2. **Mempercepat realisasi investasi asing dan domestik**
   Khususnya yang menciptakan banyak lapangan kerja
3. **Mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah**
   Yang bisa menciptakan efek berganda pada perekonomian
4. **Mengendalikan harga bahan pokok**
   Untuk menjaga daya beli masyarakat
5. **Mencegah ekspor dan impor Ilegal**
   Untuk menjaga kestabilan pasar dala negeri

9 Langkah Konkret:

6. **Memperluas kesempatan kerja**
   Terutama bagi generasi muda dan kelompok rentan
7. **Meningkatkan produktivitas sektor primer**
   Seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan (sesuai potensi lokal)
8. **Meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal**
   Untuk memperkuat nilai tambah dalam negeri
9. **Mempermudah perizinan usaha**
   Agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi

DUKUNGAN BPS DAERAH KEPADA PEMDA

1. Memberikan **pemahaman** terkait **konsep pertumbuhan ekonomi**
2. Mengidentifikasi **sektor-sektor strategis** masing-masing daerah
3. Mengidentifikasi **potensi Sumber Daya Alam** yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Memberikan **saran kepada pemda** terkait **kebijakan pendorong** pertumbuhan ekonomi

ARAHAN RILIS: PDRB KABUPATEN/KOTA TRIWULANAN

Akselerasi rilis data PDRB Triwulanan Kabupaten/Kota menjadi **+30 hari setelah rilis PDB/PDRB Provinsi**

Proses rekonsiliasi PDRB kabupaten/kota triwulanan di setiap provinsi dikawal oleh 1 orang PIC dari DNP dan DNPeng

Kualitas PDRB tiap pulau akan dipantau oleh koordinator pulau (Statistisi Ahli Madya)

PENYUSUNAN PDRB TRIWULANAN KABUPATEN/KOTA:

Ruang Pengembangan yang Membutuhkan Kolaborasi Seluruh Unit Kerja BPS

SENSUS EKONOMI 2026

SDM

- **Jumlah:** sebagian kab/kota hanya punya 1 orang untuk menghitung PDRB dua pendekatan (Lapus dan Pengeluaran).
- **Kapasitas:** sudah ada pembinaan pada 2024.
- **Rotasi dan Mutasi:** cepat berganti.

1. Penambahan SDM ke neraca regional yang memadai.
2. Rotasi dan mutasi memperhatikan keberlanjutan SDM yang kompeten dalam penghitungan PDRB.

Ketersediaan Data

- Minimnya ketersediaan data triwulanan dari PJK BPS dan eksternal di level kab/kota.
- Kedeputian NAS masih menyelenggarakan survei khusus.
- Kegiatan *snapshot* perekonomian regional (*Snapper*): masih bersifat kualitatif.

1. *Redesign* metode survei agar dapat memenuhi kebutuhan neraca (triwulanan level kab/kota).
2. Survei eksisting dilengkapi dengan kebutuhan neraca.
3. Pelaksanaan survei khusus dialihkan ke PJK Teknis.
4. Termasuk data transaksi perbankan sebagai data *mirroring* transaksi riil → *highly frequency* dan *confidential* → kolaborasi di tingkat nasional.

Peningkatan Kualitas

- Konsistensi angka PDB dan PDRB.
- Konsistensi PDRB dengan data/ indikator/fenomena.

1. Penyediaan sistem rekonsiliasi PDRB Kab/Kota.
2. Penyediaan sistem monev "***early warning***" yang meliputi: input data, bagi pakai, dan monev:
   - Pengumpulan data dan pencermatan fenomena sepanjang tahun.
   - Rekonsiliasi data dasar/pendukung.
   - Peningkatan kualitas berjenjang: Kab/kota, Provinsi, Nasional.

BADAN PUSAT STATISTIK

SENSUS EKONOMI 2026

Terima Kasih!

SENSUS EKONOMI 2026
MILIK INDONESIA

Bersama kita kawal pelaksanaan **SENSUS EKONOMI 2026** untuk mewujudkan **kemandirian perekonomian Indonesia**

#MencatatEkonomiIndonesia

BADAN PUSAT STATISTIK

SENSUS EKONOMI 2026

MENGGALI POTENSI DAERAH
DARI SISI LAPANGAN USAHA

disampaikan pada **Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Regional**

Puji Agus Kurniawan
Direktur Neraca Produksi

Jakarta, 10 Juli 2025

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI DAERAH

Optimalisasi Potensi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

SENSUS EKONOMI 2026

Langkah Konkret:

1. Percepatan realisasi APBD
2. Percepatan realisasi PMA dan PMDN yang padat karya
3. Percepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah
4. Pengendalian harga bahan pokok
5. Pencegahan ekspor dan impor Ilegal
6. Perluasan kesempatan kerja
7. Tingkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/ perikanan/ peternakan sesuai potensi lokal
8. Tingkatkan *output* industri manufaktur sesuai potensi lokal
9. Mempermudah perizinan berusaha

Sumber: Badan Pusat Statistik

CATATAN PENTING

1. Perekonomian nasional merupakan akumulasi perekonomian daerah. Daerah perlu **mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing** untuk mendorong perekonomian nasional.

2. Upaya yang dilakukan daerah untuk mendorong perekonomian **perlu direkam dalam data yang akurat**. → perlu dukungan pemerintah daerah.

3. **BPS siap** mendukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemerintah Daerah dengan **menyediakan data yang berkualitas** dalam orkestrasi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Badan Pusat Statistik

MENGGALI POTENSI DAERAH

SENSUS EKONOMI 2026

Kategori	Uraian
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M,N	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa Lainnya

Kategori		Uraian
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	
	A.1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian
	A.1.a	Tanaman Pangan
	A.1.b	Tanaman Hortikultura
	A.1.c	Tanaman Perkebunan
	A.1.d	Peternakan
	A.1.e	Jasa Pertanian dan Perburuan
	A.2	Kehutanan dan Penebangan Kayu
	A.3	Perikanan
..	...	...
C	**Industri Pengolahan**	
	C.1	Industri Batubara dan Pengolahan Migas
	C.2	Industri Makanan dan Minuman
	C.3	Industri Pengolahan Tembakau
	C.4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
	C.5	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
	C.6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
	C.7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
	C.8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
	C.9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
	C.10	Industri Barang Galian Bukan Logam
	C.11	Industri Logam Dasar
	C.12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
	C.13	Industri Mesin dan Perlengkapan
	C.14	Industri Alat Angkutan
	C.15	Industri Furnitur
	C.16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

PROSES BISNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK

SENSUS EKONOMI 2026

PENJAMINAN KUALITAS (*QUALITY ASSURANCE*)

Quality Management / Standard & Methods Management / Data & Metadata Management

Specify Needs	Design	Build	Collect	Process	Analyse	Disseminate	Evaluate
1.1 Identify needs	2.1 Design outputs	3.1 Build collection instrument	4.1 Create frame & select sample	5.1 Integrate data	6.1 Prepare draft outputs	7.1 Update output systems	8.1 Gather evaluation inputs
1.2 Consult & confirm needs	2.2 Design variable descriptions	3.2 Build or enhance process components	4.2 Set up collection	5.2 Classify & code	6.2 Validate outputs	7.2 Produce dissemination products	8.2 Conduct evaluation
1.3 Establish output objectives	2.3 Design collection	3.3 Build or enhance dissemination components	4.3 Run collection	5.3 Review & validate	6.3 Interpret & explain outputs	7.3 Manage release of dissemination products	8.3 Agree an action plan
1.4 Identify concepts	2.4 Design frame & sample	3.4 Configure workflows	4.4 Finalise collection	5.4 Edit & impute	6.4 Apply disclosure control	7.4 Promote dissemination products	
1.5 Check data availability	2.5 Design processing & analysis	3.5 Test production system		5.5 Derive new variables & units	6.5 Finalise outputs	7.5 Manage user support	
1.6 Prepare business case	2.6 Design production systems & workflow	3.6 Test statistical business process		5.6 Calculate weights			
		3.7 Finalise production system		5.7 Calculate aggregates			
				5.8 Finalise data files			

Proses

Fase

Sub-proses

BADAN PUSAT STATISTIK

Terima Kasih!

www.bps.go.id

.....

BADAN PUSAT STATISTIK

SENSUS EKONOMI 2026

Menuju Monev Perekonomian Regional

Pipit Helly Sorayan

Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI

Jakarta, 10 Juli 2025

Alur Perekonomian Sederhana

SENSUS EKONOMI 2026

Rumah Tangga

Faktor-faktor Produksi
(Tanah, Tenaga Kerja, Modal, Kewirausahaan)

Balas Jasa Faktor Produksi
(Sewa Lahan, Balas Jasa Tenaga Kerja, Bunga, Keuntungan

Pengeluaran Konsumsi
(Arus Uang)

Barang dan Jasa
(Arus Barang)

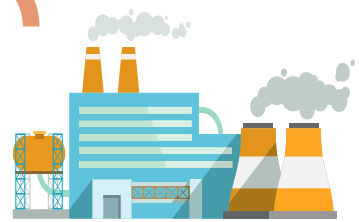

Perusahaan

PDB = Σ Produk Akhir = Σ NTB

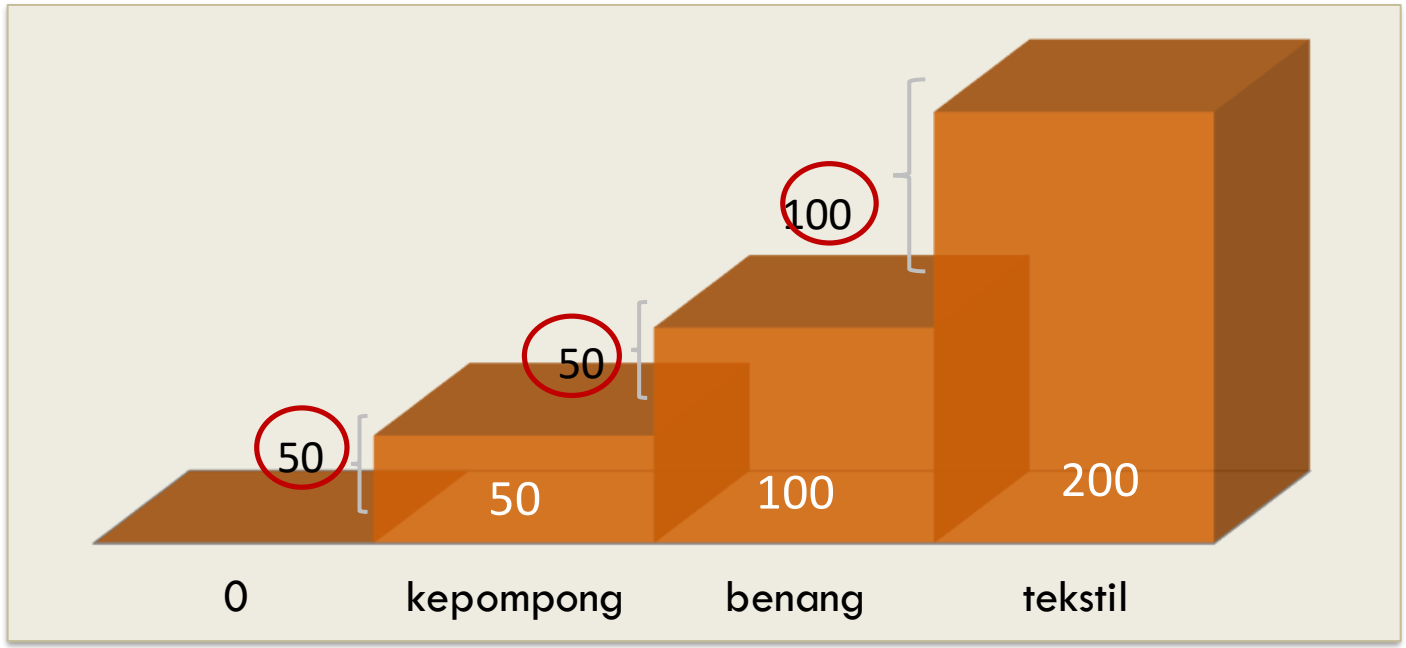

NTB

Dari grafik:

PDB = 50 + 50 + 100 = **200**

Produk akhir

Kepompong ulat sutra= 50

Benang sutra = 100

Tekstil sutra = **200**

PDB/PDRB HARGA KONSTAN DAN HARGA BERLAKU

Aspek	PDB/PDRB Harga Berlaku	PDB/PDRB Harga Konstan
Definisi	Nilai total barang dan jasa berdasarkan harga saat ini (tahun berjalan)	Nilai total barang dan jasa berdasarkan harga tetap (tahun dasar)
Tujuan	Menggambarkan **nilai ekonomi nominal** pada suatu periode	Mengukur **pertumbuhan ekonomi riil** (tanpa pengaruh inflasi)
Pengaruh Harga (Inflasi)	Dipengaruhi inflasi/deflasi	Tidak dipengaruhi inflasi karena menggunakan harga tetap (tahun dasar)
Kegunaan Utama	▸ Mengukur struktur ekonomi saat ini ▸ Basis perhitungan rasio ekonomi (seperti rasio utang/PDB)	▸ Mengukur pertumbuhan ekonomi ▸ Melihat perubahan volume riil produksi
Contoh Nilai	Tahun 2024 bernilai Rp22.138 triliun (harga pasar 2024)	Tahun 2024 bernilai Rp12.920 triliun (dalam harga konstan 2010)
Nama Lain	Nominal GDP	Real GDP

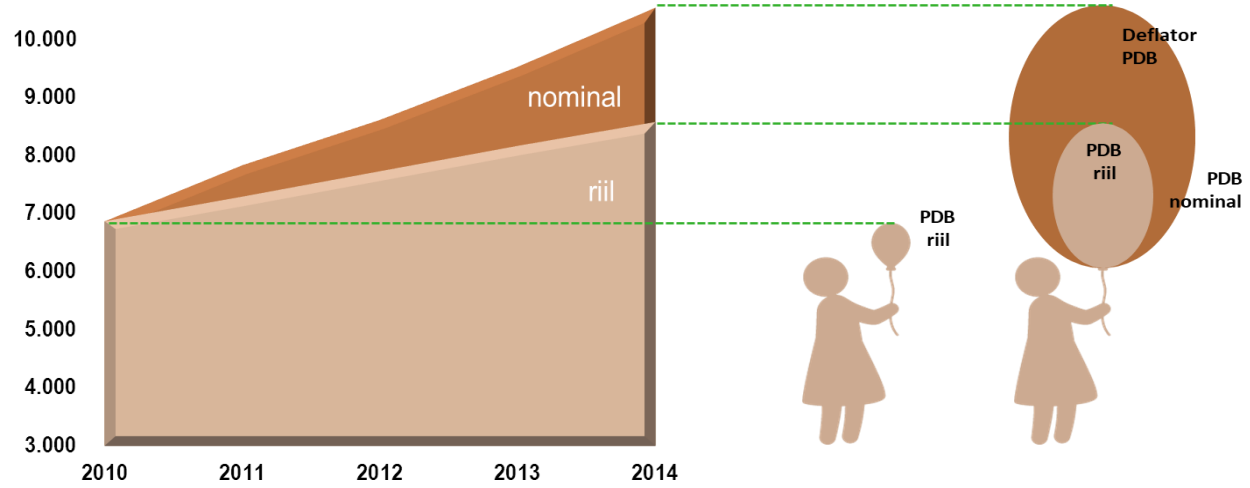

Deflator PDB digunakan untuk menyusutkan balon PDB nominal, sehingga didapatkan ukuran balon riil.

Sumber: Badan Pusat Statistik

PENGHITUNGAN PDB/PDRB PENGELUARAN

C + I + G + X - M

- **C** → Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT
- **I** → PMTB, Perubahan Inventori
- **G** → Konsumsi Pemerintah
- **X** → Ekspor
- **M** → Impor

PDB/PDRB Menurut Pengeluaran merupakan **penggunaan akhir** berbagai barang dan jasa yang tersedia di perekonomian Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
5. Perubahan Inventori
6. Ekspor - Impor

PDB/PDRB Pengeluaran adalah penjumlahan dari 6 komponen

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator Proksi Pertumbuhan Ekonomi (bulanan)

SENSUS EKONOMI 2026

Proxy PDB/PDRB Sisi Pengeluaran

Konsumsi Masyarakat:

- Indeks Penjualan Ritel (kerjasama dengan BI dan Nielsen)
- Mobilitas masyarakat (wisnus hingga kab/kota)
- Jumlah penumpang pesawat, kereta, kapal (di kab/kota lokasi bandara/stasiun/pelabuhan)
- Konsumsi listrik bulanan
- Transaksi QRIS, kartu debit, kartu kredit

Investasi:

- Realisasi PMA, PMDN
- Belanja Modal APBN → BPS ke Kemenkeu
- Belanja Modal APBD → Kemendagri

Belanja Pemerintah:

- Realisasi APBN (BPS ke Kemenkeu)
- Realisasi APBD (Kemendagri)

Ekspor – Impor:

- Perkembangan Ekspor (data hingga kab/kota)
- Perkembangan Impor (data hingga provinsi)
- Perkembangan wisman (data tersedia menurut pintu masuk)

10 Langkah-Langkah yang harus dilakukan daerah:

1. Percepat realisasi APBD
2. Percepat realisasi PMA dan PMDN, terutama yang padat karya
3. Percepat realisasi proyek-proyek insfrastruktur pemerintah
4. Pengendalian harga bahan pokok
5. Pencegahan ekspor-impor illegal
6. Perluasan kesempatan kerja

9 (SEMBILAN) UPAYA/LANGKAH KONKRET MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

SENSUS EKONOMI 2026

1 Percepatan realisasi APBD

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah:

1. **Belanja Pegawai**
   a. TW I min. 20%
   b. TW II min. 50%
   c. TW III min. 75%
   d. TW IV min. 95%
2. **Belanja Barang dan Jasa**
   a. TW I min. 15%
   b. TW II min. 50%
   c. TW III min. 70%
   d. TW IV min. 90%
3. **Belanja Modal**
   a. TW I min. 10%
   b. TW II min. 40%
   c. TW III min. 70%
   d. TW IV min. 90%
4. **Belanja Bantuan Sosial**
5. **Pendapatan Retribusi Daerah**

Catt:
Realisasi anggaran memanfaatkan data SIPD per minggu
(per tanggal 30 setiap bulan)

2 Percepatan realisasi PMA dan PMDN

1. **Utilitas kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus:**
   a. Target dan realisasi investasi baik melalui investasi asing maupun dalam negeri.
   b. Fasilitasi kawasan mencakup logistik, air, energi, gudang.
   c. Jumlah tenaga kerja:
      - Posisi awal tenaga kerja
      - Penambahan tenaga kerja
      - Posisi akhir tenaga kerja
   d. Total Luas area kawasan industri/ekonomi khusus dan jumlah area yang dimanfaatkan.
2. **Subsidi atau insentif pajak/retribusi daerah** untuk investasi terutama di sektor prioritas

Catt:
Informasi seluruh rencana PMA dan PMDN berikut realisasinya, selain Pemda input bisa diperoleh dari laporan pelaku usaha ke OSS BKPM

3 Percepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah

1. **Alokasi dan realisasi** anggaran **belanja modal infrastruktur** yang **bersumber dari APBD**
2. **Realisasi progres Proyek Strategis Nasional** di daerah masing-masing
3. **Data ketersediaan energi** untuk industri yang terdiri dari:
   a. data kapasitas pembangkit per wilayah;
   b. data jaringan transmisi dan distribusi;
   c. peta lokasi dan alokasi gas bumi.
4. **Data keterjangkauan energi** yang terdiri dari:
   a. tarif listrik industri berdasarkan golongan dan kapasitas;
   b. tarif gas industri berdasarkan lokasi;
   c. durasi dan jumlah pemadaman.
5. **Data proksi biaya logistik**, yang terdiri dari:
   a. biaya kirim barang 1 ton dari pelabuhan ke kawasan industri per 100 km;
   b. biaya bongkar muat dan handling pelabuhan.
6. **Pelaksanaan tender Pra-DPA belanja modal infrastruktur.**

Catt:
Pemda dalam menginput Data ketersediaan dan keterjangkauan energi bisa berkoordinasi dengan kementerian ESDM.

4 Pengendalian harga bahan pokok

1. **Pemantauan harga dan stok** untuk memastikan kebutuhan tersedia
2. **Rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah**
3. **Menjaga pasokan** bahan pokok dan barang penting
4. Pencanangan **gerakan menanam**
5. Melaksanakan **operasi pasar murah** bersama dinas terkait
6. Melaksanakan **sidak ke pasar dan distributor** agar tidak menahan barang
7. **Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi** untuk kelancaran pasokan
8. **Merealisasikan BTT** untuk dukungan pengendalian inflasi
9. **Memberikan bantuan tranportasi dari APBD.**

Catt: 9 langkah konkrit memanfaatkan data wasinflasi.kemendagri.go.id

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Itjen Kemendagri, diolah 6 Juli 2025

6

9 (SEMBILAN) UPAYA/LANGKAH KONKRIT MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

SENSUS EKONOMI 2026

Lanjutan...

5 Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal

1. **Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu** yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal
2. **Pengawasan peredaran barang-barang ilegal** (baju, rokok, elektronik dll)

6 Perluasan Kesempatan Kerja

1. **Jumlah angkatan kerja *by name by address*** sampai tingkat kelurahan/desa
2. **Jumlah target penyerapan dan realisas**i penyerapan tenaga kerja
3. Jumlah angkatan kerja yang **sudah dilakukan pelatihan**
4. Jumlah angkatan kerja yang **mendapatkan pekerjaan sesuai pelatihan yang dilakukan**
5. **Pengembangan kewirausahaan**
6. **Kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal** dalam proyek-proyek konstruksi di daerah

7 Tingkatkan Produktivitas Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan/ Peternakan Sesuai Potensi Lokal

1. **Kebijakan daerah untuk meningkatkan produktivitas** pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan sesuai potensi lokal (misal Perkada lahan sawah dilindungi)
2. **Alokasi APBD untuk peningkatan produktivitas** (misal *cold storage*, bantuan saprodi, benih, irigasi, dan lain-lain)
3. **Kemitraan** petani/nelayan/peternak dan industri **untuk penyerapan hasil panen**

8 Tingkatkan Output Industri Manufaktur Sesuai Potensi Lokal

1. **Hilirisasi dan industrialisas**i produksi unggulan daerah
2. **Percepatan izin ekspor** produk hasil hilirisasi
3. **Bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata:**
   a. Menggali potensi pariwisata di masing-masing daerah
   b. Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata
   c. Meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata

d. **Fasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan TKDN untuk UMKM industri lokal**

9 Mempermudah Perizinan Berusaha

1. **Jumlah** Rencana Detail Tata Ruang **(RDTR) yang sudah ditetapkan dan terintegrasi OSS**
2. **Penyederhanaan standar** biaya, waktu, syarat layanan perizinan
3. **Tim pengawasan perizinan di daerah:**
   a. Pembentukan tim
   b. Hasil kerja pengawasan
4. **Semua layanan telah diproses di MPP** (tidak ada antar berkas ke kantor dinas teknis)
5. **Jumlah keluhan perizinan dan tindak lanjut penyelesaiannya**

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Itjen Kemendagri, diolah 6 Juli 2025

DATA PROFIL PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

SENSUS EKONOMI 2026

1 Pembentukan Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemda menetapkan SK Pembentukan Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Format melalui surat edaran ke daerah dengan poin antara lain tugas dan tanggung jawab).

Catt:

1. Lingkup pusat tidak perlu menginput dalam aplikasi.
2. Kegiatan pengendalian dilakukan bulanan dan rilis pengendalian bersamaan Rapat Inflasi Mingguan.
3. Diskusi dengan tim teknis antar K/L Pusat diagendakan sebelum peluncuran aplikasi

2 Menggali potensi wilayah dan memasukkannya kedalam RPJMD

Mengisi dan Mengunggah bukti potensi wilayah sesuai RPJMD, yang terdiri dari:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian.
3. Industri Pengolahan.
4. Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es.
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
6. Konstruksi.
7. Jasa Pendidikan.
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
9. Jasa lainnya.
10. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
11. Transportasi dan Pergudangan.
12. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
13. Informasi dan Komunikasi.
14. Jasa Keuangan dan Asuransi.
15. Real Estate.
16. Jasa Perusahaan.
17. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Catt: Dianalisis dengan:

1. Tabel Input Output untuk identifikasi potensi wilayah
2. Menggunakan *Source of Growth* (SoG).

3 Angka Pertumbuhan ekonomi Daerah

1. **Data realisasi pertumbuhan ekonomi:**
   a. Bulanan.
   b. Triwulanan.
   c. Tahunan.
2. **Total pertumbuhan dan uraian PDRB sisi produksi dan PDRB sisi pengeluaran.**

Catt:
Menggunakan data BPS yang ditanam ke sistem untuk menghindari input angka yang berbeda.

4 Diagnosis Kendala Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1. Aspek Pembiayaan.
2. Ketenagakerjaan.
3. Pendidikan.
4. Kesehatan.
5. Infrastruktur.
6. Regulasi dan Institusi.
7. Fiskal Daerah.
8. Geografis/ infrastruktur.
9. Daya Saing Ekonomi.
10. Pungli/premanisme.
11. Konflik.
12. Kendala lainnya (di luar angka 1-11).

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Itjen Kemendagri, diolah 6 Juli 2025

SENSUS EKONOMI 2026

Hasil Supervisi

Monev Indikator Perekonomian Regional

(2-7 Juli 2025)

Kondisi SDM Neraca di sebagian wilayah supervisi

SENSUS EKONOMI 2026

Rata-rata jumlah SDM Nerwilis di kabupaten/kota sebanyak 3 orang*

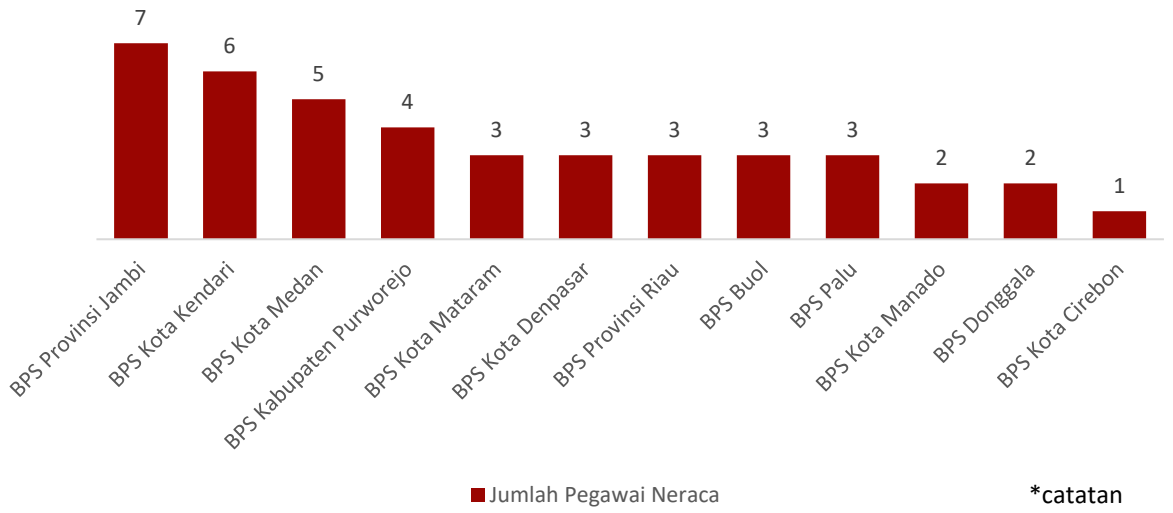

*catatan

Sekitar 70 persen SDM Nerwilis di Kabupaten/Kota belum menerima diklat keneracaan

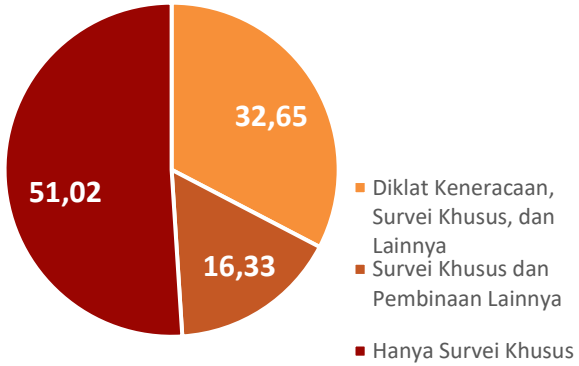

SDM Nerwilis dengan masa kerja 3 tahun lebih sekitar 53 persen sudah mengikuti diklat keneracaan

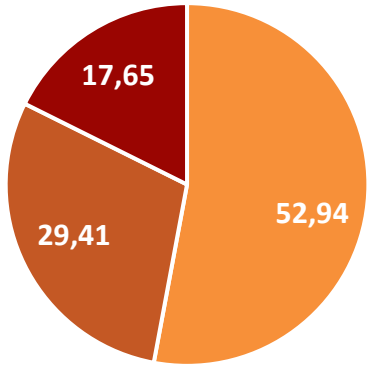

Sekitar 22,4 persen lama bekerja di Nerwilis belum sampai 1 tahun

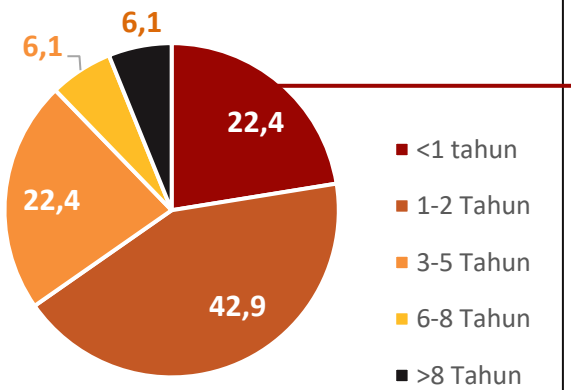

Sekitar 54,55 persen SDM yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun belum pernah berpengalaman di neraca

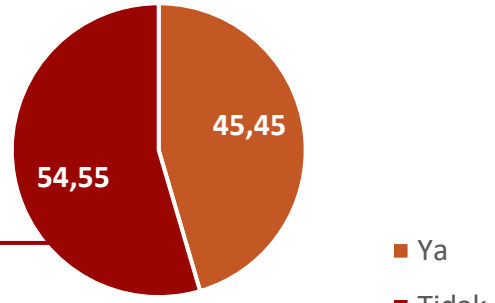

Sekitar 51,02 persen SDM tidak dan kurang memahami penghitungan PDRB Triwulanan

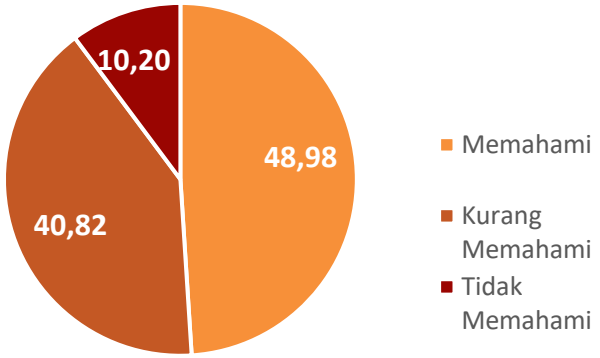

SDM Nerwilis dengan masa kerja 3 tahun lebih sekitar 70 persen sudah memahami penghitungan PDRB Triwulanan

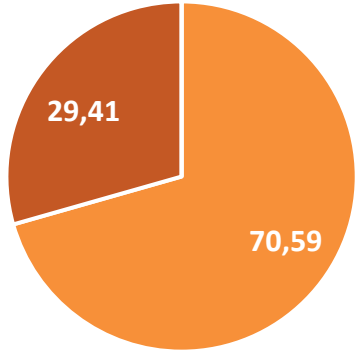

Ket: *) Jumlah SDM Nerwilis kab/kot berpotensi termasuk penanggung jawab wilayah/kecamatan

Ketersediaan Data Bulanan

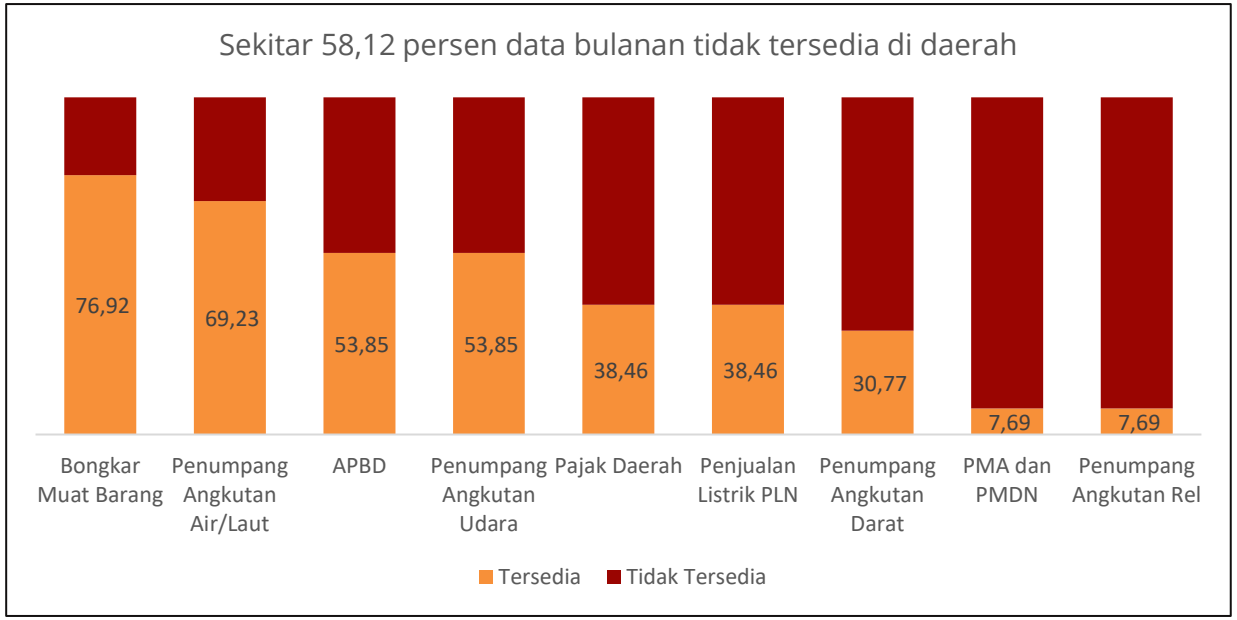

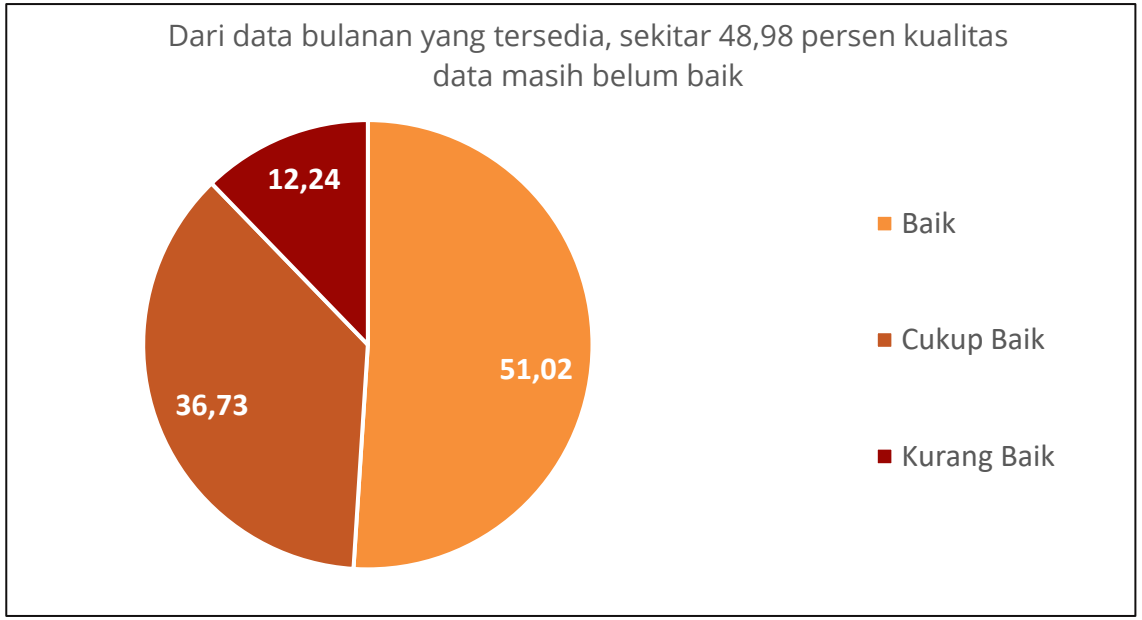

Data bulanan lainnya yang kemungkinan tersedia

- Data BPJS Kesehatan
- Data Jumlah Kendaraan Baru dan Bekas
- Data jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan RSUD
- Data jumlah wisatawan
- Data BULOG
- Data ekspor Disperindag
- Data Koperasi dan UMKM
- Data kunjungan Mall (APPBI)
- Data PDAM

PDRB Triwulanan Kabupaten/Kota

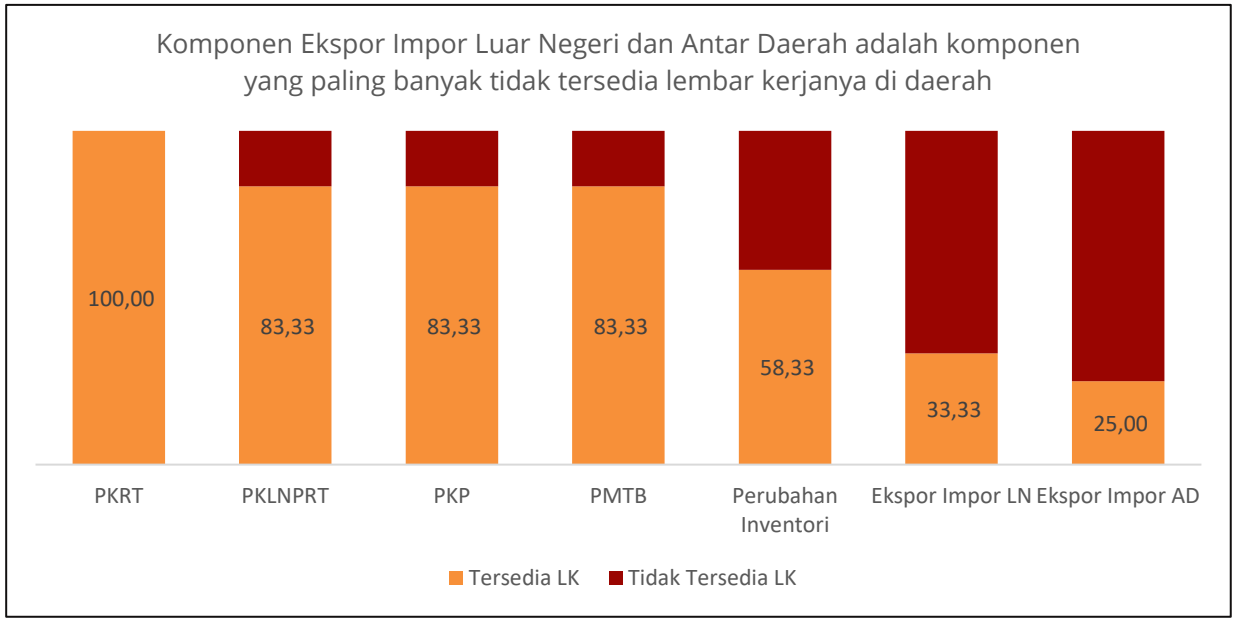

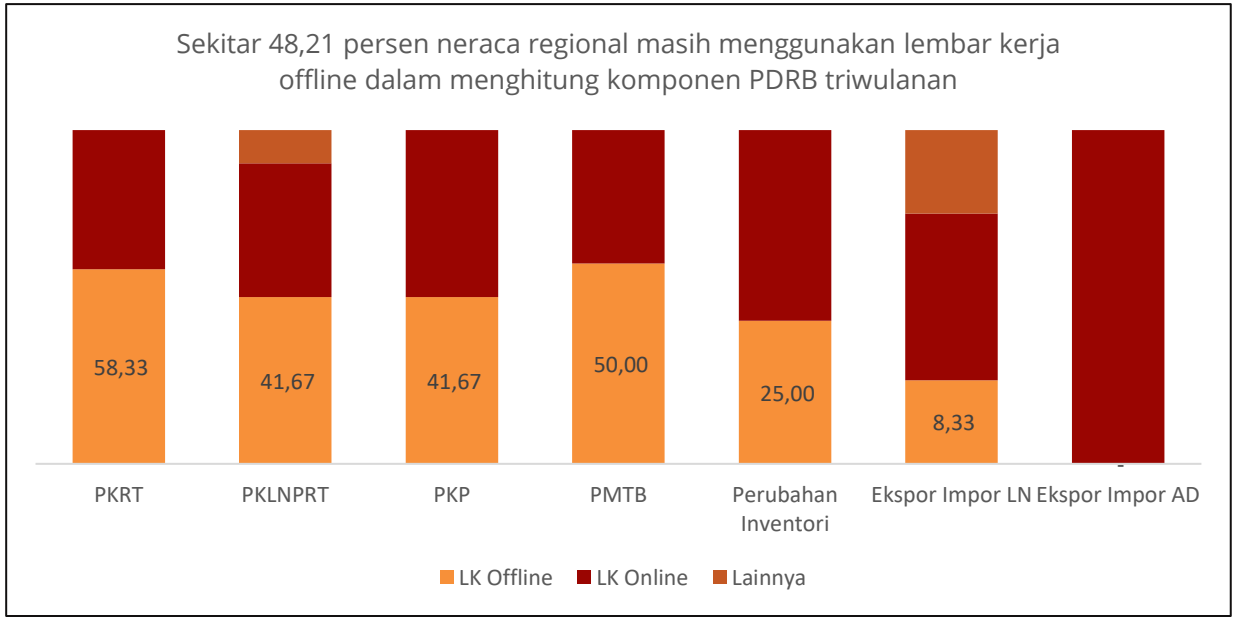

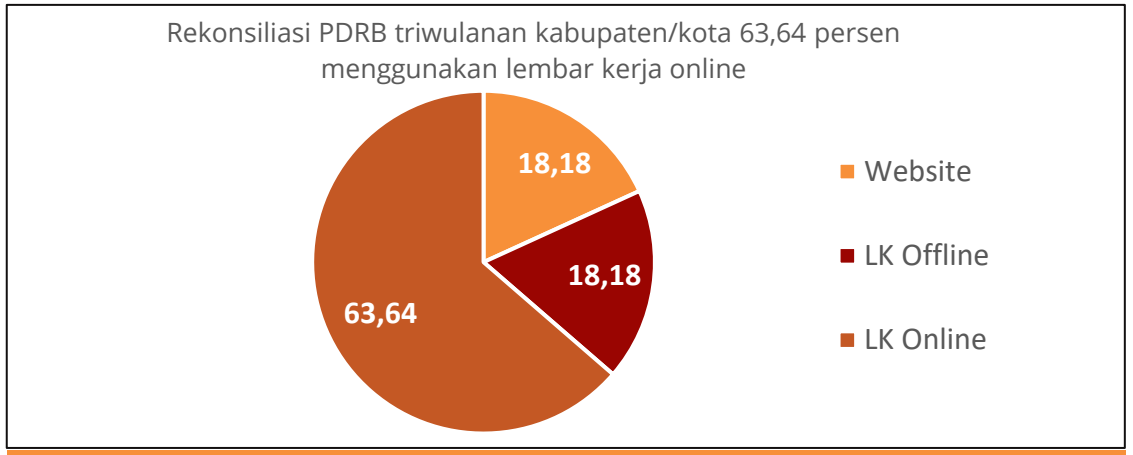

Data dasar yang digunakan dalam menghitung PDRB Triwulanan

- Komponen PKRT: Data SERUTI, IHK
- Komponen PKLNPRT: Data SKLNPT, IHK
- Komponen PKP: APBD, APBN, Output BI, IHK, IHPB, Indeks Upah
- Komponen PMTB: Output Konstruksi, Realisasi Belanja Modal, PMA/PMDN
- Komponen PI: Data BULOG, hasil SKSPPI
- Ekspor Impor: Data bongkar muat barang, Data KPPBC,

- Sekitar 54,55 persen proses rekonsiliasi selesai pada putaran ke-3 atau lebih untuk menghasilkan angka final
- Sekitar 90,56 persen Kabupaten/Kota sudah mengikuti rambu-rambu/aturan dalam penghitungan PDRB Triwulanan
- Seluruh wilayah supervisi sudah menggunakan template kirim angka dan merilis angka pada website tepat waktu.
- Sekitar 69,23 persen hasil evaluasi angka PDRB triwulanan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti oleh tim dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

SUPERVISI MONEV PEREKONOMIAN REGIONAL

Saat ini sedang dilakukan sosialiasi pelaksanaan monev indikator perekonomian regional di sejumlah provinsi

SENSUS EKONOMI 2026

No	Wilayah Supervisi	Nama Pegawai	Waktu
1	Kota Banda Aceh, Aceh	Ariyan Riga Bajrayuda	9-11 Juli 2025
2	Kota Padang, Sumatera Barat	Opan Fauzan Hamdan	9-11 Juli 2025
3	Provinsi Sumatera Selatan	Nur Hafizah Agustina	9-11 Juli 2025
4	Kota Bengkulu, Bengkulu	Fakhriza Akbar	9-11 Juli 2025
5	Kota Bandar Lampung, Lampung	Zaitun Rohmah	10-12 Juli 2025
6	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dita Desriani	9-11 Juli 2025
7	Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung	Amida Alviani Muntaha	9-11 Juli 2025
8	Provinsi Kepulauan Riau	Vina Eka Andriyani	9-11 Juli 2025
9	Provinsi Jawa Tengah	Mohamad Arif Kurniawan	9-11 Juli 2025
10	Kota Semarang, Jawa Tengah	Fatma Yuliana	9-11 Juli 2025
11	Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta	Nurul Ainun Nisa'	9-11 Juli 2025
12	Kota Surabaya, Jawa Timur	Anisa Nuraini	9-11 Juli 2025
13	Kota Blitar, Jawa Timur	Anisa Muna Majidah	9-11 Juli 2025
14	Kota Tangerang, Banten	Refnita Mulya Aknur	9-11 Juli 2025
15	Kota Tangerang Selatan, Banten	Agnes Vera Yanti Sitorus	9-11 Juli 2025
16	Provinsi Kalimantan Barat	Asfika Rizkyana	9-11 Juli 2025
17	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Sartika Andari Murti	9-11 Juli 2025
18	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Nigel Roy Tantan	10-12 Juli 2025
19	Provinsi Kalimantan Utara	Yuniarti	9-11 Juli 2025
20	Kota Gorontalo, Gorontalo	Hana Dwi Kristanti	9-11 Juli 2025
21	Provinsi Maluku	Putri Puspita Ayu	9-11 Juli 2025
22	Provinsi Maluku Utara	Billindo Elian	9-11 Juli 2025
23	Provinsi Papua	Wahyu Setyo Budi	9-11 Juli 2025
24	Provinsi Papua Barat	Syaikhul Ibad	9-11 Juli 2025

BADAN PUSAT STATISTIK

Terima Kasih!

www.bps.go.id

.....